



**CURRENT**  
**Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini**  
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



**PELAKSANAAN E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA: KEMANDIRIAN DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN REGIONAL GOVERNMENT IN INDONESIA: REGIONAL INDEPENDENCE AS A MODERATING VARIABLE**

**Arimi Ilma<sup>1</sup>, Yesi Mutia Basri<sup>2\*</sup>, Nur Azlina<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Magister Akuntansi, Universitas Riau, Pekanbaru

\*Email: yesimutiabasri@lecturer.unri.ac.id

**Keywords**

*Regional original income; population influence the implementation of E-Government; Regional independence*

**Article informations**

*Received:*  
2024-04-01  
*Accepted:*  
2025-03-25  
*Available Online:*  
2025-03-27

**Abstract**

*The purpose of this study was to determine the effect of region, local revenue, and population on the implementation of E-Government with regional independence as an intervening variable. In determining the sample, this study used a purposive sampling technique, namely sampling using criteria based on research policies. Observation data of 123 were taken from 41 districts/cities from a 3 (three) year observation period starting from 2020-2022. The type of data used is quantitative data sourced from secondary sources. Data analysis used multiple linear regression and Conditional Process Analysis from Hayes. The results of the study showed that region, local revenue, and population influenced the implementation of E-Government. Regional independence moderates the effect of local revenue and population on the implementation of E-Government. Meanwhile, regional independence does not moderate the effect of the region on the implementation of E-Government. This study contributes to local governments in the implementation of e-government*

**PENDAHULUAN**

Pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan kebutuhan masyarakat yang menuntut adanya pelayanan efektif dan efisien melalui teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjawab kebutuhan tersebut pemerintah melakukan upaya dengan menyelenggarakan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik atau disebut dengan *E-Government*. Tujuan awal adanya *E-Government* adalah bagaimana pemerintah menggunakan teknologi informasi secara inovatif untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai macam informasi dan layanan pemerintah. *E-Government* juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang prima dengan cara memberikan ruang partisipasi aktif kepada masyarakat dalam proses pemberian pelayanan prima tersebut (Ramdani, 2018).

Pengembangan *E-Government* di Indonesia sendiri telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No. 3 Tahun 2003. Sistem *E-Government* diharapkan



pemerintah menjadi inovatif dalam penggunaan TIK untuk tujuan menyediakan dan memberikan fasilitas kepada masyarakat. Penerapan *E-Government* juga diharapkan dapat meningkatkan interaksi warganya kepadapemerintah sehingga dapat meminimalisir asimetri informasi serta dapat melakukan penghematan anggaran pemerintah (Pradipta & Sofyani, 2021).

Pada saat ini, penerapan *E-Government* di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja, namun sudah diinstruksikan dan mulai diterapkan oleh pemerintah daerah. {Formatting Citation} mengatakan dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia yang telah menerapkan *E-Government* tidak semuanya masuk ke dalam pemeringkatan indeks *E-Government* (PeGI) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Sedangkan pada tahun 2022, dari 38 (tiga puluh delapan) provinsi di Indonesia hanya 24 (dua puluh empat) Provinsi yang termasuk kedalam hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE. Nilai maksimal untuk kategori memuaskan berada pada rentang 4,2-5,00 dan target penilaian berada pada predikat baik dengan nilai minimal 2,6. Tabel 1 menyajikan prediket penggunaan SPBE di berbagai Provinsi di Indonesia.

**Tabel 1**

**Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Sumatera Barat dan Jambi Tahun 2019, 2021, dan 2022**

No	Nama Provinsi	Tahun 2019		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Indeks	Predikat	Indeks	Predikat	Indeks	Predikat
1	Riau	3,51	Sangat Baik	2,55	Cukup	3,00	Baik
2	Sumbar	2,78	Baik	2,69	Baik	3,18	Baik
3	Jambi	1,79	Kurang	2,21	Cukup	2,79	Baik

Sumber: Kominfo.go.id, 2023

Tabel 1 menunjukkan nilai SPBE yang dimiliki oleh 3 provinsi di wilayah Sumbagteng, yaitu: Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi tahun 2019, 2021, dan tahun 2022. Nilai SPBE Provinsi Riau mengalami fluktuatif cenderung menurun, dimana tahun 2019, meraih predikat sangat baik, namun pada tahun 2021 menurun menjadi predikat cukup, pada tahun 2022, nilai SPBE kembali mengalami peningkatan menjadi baik. Selanjutnya provinsi Sumatera Barat yang memiliki nilai SPBE yang cenderung stabil dari tahun 2019, 2021 dan 2022 yang selalu meraih predikat baik, namun dari segi indeks mengalami fluktuatif cenderung meningkat. Namun berbeda dengan Provinsi Jambi yang memiliki peningkatan indeks maupun predikat dari tahun 2019, 2021 dan 2022.

Mengacu pada beberapa literatur, luas wilayah merupakan faktor yang menentukan penggunaan SPBE. Luas wilayah yang besar akan membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih besar agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas baik kepada masyarakat jika dibandingkan dengan luas wilayah daerah yang lebih kecil (Rohmah & Riharjo, 2019). Hasil penelitian (Rohmah & Riharjo, 2019) menunjukkan bahwasanya luas wilayah harus diimbangi dengan besarnya belanja modal. Dengan demikian, semakin besar luas wilayah maka semakin besar belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melayani masyarakat di seluruh daerah dalam penyediaan infrastruktur TIK. Untuk tujuan ini, motivasi untuk mengembangkan *E-Government* oleh pemerintah daerah akan semakin besar. Penelitian yang mendukung tentang adanya pengaruh antara Luas Wilayah terhadap pelaksanaan *E-Government* (Maulana & Fadhli, 2020), sedangkan penelitian Pradipta & Sofyani (2021) menyatakan sebaliknya bahwasanya tidak ada pengaruh antara Luas Wilayah terhadap Pelaksanaan *E-Government*.

Kim (2007) menyatakan bahwa kinerja *E-Government* ditentukan oleh kesejahteraan ekonomi, pendidikan, urbanisasi, kebebasan rakyat, efektivitas pemerintahan, dan interaksi antara penggunaan internet dan kesejahteraan ekonomi. Hal ini dapat diartikan bahwa jika kesejahteraan ekonomi daerah tinggi, maka pemerintah daerah mempunyai biaya yang cukup

untuk melayani masyarakatnya melalui implementasi *E-Government*, karena implementasi *E-Government* diharapkan untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan biaya besar (Sipahutar & Sutaryo, 2017). Penelitian yang mendukung tentang adanya pengaruh antara PAD terhadap pelaksanaan *E-Government* (Utami et al., 2019; Sipahutar & Sutaryo, 2017 ; Rahim et al., 2020 ; Oktaviani & Indra Arza, 2020) .

Jumlah Penduduk suatu wilayah juga sangat mungkin berhubungan dengan pelaksanaan *E-Government*. Hasil penelitian dari Pradipta dan Sofyani (2021) menunjukkan bahwa pada tingkat moderat pengaruh jumlah penduduk memiliki manfaat bagi pembangunan ekonomi, baik untuk negara-negara maju maupun negara-negara yang berkembang. Cara jitu yang sangat mungkin diadopsi adalah dengan meningkatkan kapabilitas implementasi *E-Government*. Pradipta & Sofyani (2021) menemukan bahwa terdapat hubungan antara jumlah penduduk dengan praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) di pemerintah. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa setiap kota yang memiliki jumlah penduduk lebih besar lebih memungkinkan untuk memberikan akses yang lebih mudah terhadap IFR. Menggunakan logika yang sama, sangat mungkin jumlah penduduk juga akan berkaitan dengan tingkat pelaksanaan *E-Government*. Penelitian yang mendukung tentang adanya pengaruh antara Jumlah Penduduk terhadap pelaksanaan *E-Government* adalah Dewi dan Haryanto (2013), sedangkan penelitian Pradipta dan Sofyani (2021) serta Verawaty (2018) menyatakan sebaliknya bahwasanya tidak ada pengaruh antara Jumlah Penduduk terhadap Pelaksanaan *E-Government*.

Untuk mewujudkan pelaksanaan *E-Government* di Indonesia yang optimal dibutuhkan penerapan prinsip Kemandirian Daerah sehingga pemerintah dapat selalu siap berkontribusi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan Sedarmayanti (2009) . Prinsip Kemandirian Daerah menurut Tahar & Zakhiya (2011) kemampuan dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan. Penelitian tentang Kemandirian Daerah sebagai variabel moderasi telah dilakukan Pradipta dan Sofyani (2021) menyatakan bahwa Kemandirian Daerah sebagai variabel moderasi terbukti hanya mampu memperkuat hubungan antara Luas Wilayah dengan Pelaksanaan *E-Government*.

Pengukuran Kemandirian Daerah dapat dilihat dari besaran sumber Pendapatan Asli Daerah karena menggambarkan bagaimana keadaan potensi riil suatu daerah (Yuliyanto, 2018). Keuangan pemerintah daerah yang bergantung dengan keuangan pemerintah pusat menyebabkan rendahnya Kemandirian Daerah. Halim (2014) memberikan pandangan bahwa besaran pendapatan yang diperoleh langsung daerah akan berdampak pada tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Sanga et al. (2018) yang menemukan bahwa Kemandirian Daerah dipengaruhi secara positif oleh Pendapatan Asli Daerah,

Penulis berpedoman pada beberapa riset sebelumnya yaitu riset dari (Pradipta & Sofyani, 2021), Sipahutar dan Sutaryo (2017). Kebaruan riset ini adalah adanya penambahan variabel independen Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan pengurangan terhadap beberapa variabel dari riset-riset terdahulu tersebut, dimana alasan menambahkan variabel Pendapatan Asli Daerah ialah karena masih sedikitnya penelitian terdahulu yang meneliti variabel tersebut, dan juga untuk melihat Pelaksanaan *E-Government* di Provinsi Riau.

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### ***Pengaruh Luas Wilayah terhadap Pelaksanaan E-Government***

Keberhasilan Pelaksanaan *E-Government* tidak terlepas dari pengaruh besarnya Luas Wilayah suatu daerah. Pelaksanaan *E-Government* yang dilakukan oleh pemerintah suatu daerah memegang peranan penting dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan dalam rangka untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi kinerja dalam menyajikan, melaporkan



dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah (*steward*) kepada Masyarakat (*agent*). Hal ini sesuai dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa sektor publik wajib menempatkan kepentingan masyarakat (*agent*) sebagai prioritas sehingga sektor publik dituntut untuk selalu berorientasi pada perbaikan kinerja secara terus menerus sehingga mencapai kinerja yang optimal untuk kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991).

Dalam upaya melakukan perbaikan kinerja secara terus menerus, pemerintah suatu daerah perlu melaksanakan *E-Government* secara optimal. Daerah dengan wilayah yang lebih luas, membutuhkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan *E-Government* yang lebih banyak untuk pelayanan kepada publik jika dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. Semakin besarnya luas wilayah suatu daerah maka akan berpengaruh pada pelaksanaan *E-Government* daerah tersebut yang cenderung akan semakin meningkat karena akan membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih besar agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat jika dibandingkan dengan luas wilayah yang lebih kecil (Rohmah & Riharjo, 2019).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dengan wilayah yang semakin luas maka daerah tersebut akan membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak untuk mendukung kegiatan pemerintahan agar masyarakat diseluruh wilayah itu dapat menerima dan mengakses informasi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di pemerintahan dengan lebih cepat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rohmah dan Riharjo (2019) dan Alvini et al., (2018) yang menunjukkan bahwa semakin besar luas wilayah maka akan semakin besar belanja yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut dalam memenuhi dan melayani masyarakat diseluruh daerahnya dengan melakukan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan e-government. Dengan dioptimalkannya pelaksanaan *E-Government*, hal ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis digital karena dinilai lebih cepat, efektif dan efisien dalam melayani masyarakat diseluruh wilayah kerja mereka. Berdasarkan uraian ringkas teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Luas Wilayah berpengaruh terhadap Pelaksanaan E-Government.**

### ***Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pelaksanaan E-Government***

Besarnya Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan alokasi belanja modal yang akan dibelanjakan oleh suatu daerah dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung daerah tersebut (Dasmal et.al,2020) termasuk dalam pelaksanaan *E-Government* yang optimal. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan oleh suatu daerah maka semakin besar pula jumlah alokasi belanja modal yang akan dibelanjakan oleh suatu daerah tersebut dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan *E-Government* yang optimal, dan berlaku sebaliknya (Maulana & Fadhli, 2020).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti berikut ini seperti Penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi & Haryanto (2013), Arsita, (2020) serta Sipahutar & Sutaryo (2017) yang menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Pelaksanaan E-Government. Berdasarkan uraian ringkas teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan E-Government.**

### ***Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pelaksanaan E-Government***

Dalam upaya melakukan perbaikan kinerja secara terus menerus, pemerintah suatu daerah perlu melaksanakan *E-Government* secara optimal. Daerah dengan jumlah penduduk yang lebih banyak, membutuhkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan E-

*Government* yang lebih banyak untuk pelayanan kepada publik jika dibandingkan dengan daerah dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Semakin banyaknya jumlah penduduk suatu daerah maka akan berpengaruh pada pelaksanaan *E-Government* daerah tersebut yang cenderung akan semakin meningkat karena akan membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih besar agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat jika dibandingkan dengan daerah dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit (Sipahutar dan Sutaryo, 2017).

Jumlah penduduk suatu daerah juga sangat mungkin berhubungan dengan tingkat pelaksanaan *E-Government* seperti yang dinyatakan oleh Adriani dan Handayani (2008) dalam penelitian mereka bahwasanya pada tingkat moderat pengaruh jumlah penduduk memiliki manfaat bagi pembangunan ekonomi, baik untuk negara-negara maju maupun negara-negara yang berkembang. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar tuntutan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi aspirasi penduduknya. Karenanya, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjangkau dan memberikan layanan kepada seluruh penduduk di pelosok daerah (Pradipta & Sofyani, 2021). Daerah dengan Jumlah Penduduk yang lebih banyak, membutuhkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan *E-Government* yang lebih banyak pula untuk pelayanan kepada publik jika dibandingkan dengan daerah dengan Jumlah Penduduk yang sedikit. Berdasarkan uraian ringkas teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3: Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pelaksanaan *E-Government*.**

#### ***Kemandirian Daerah dapat memoderasi hubungan antara Luas Wilayah dengan Pelaksanaan *E-Government****

Gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya (Tahar & Zakhiya, 2011). Dengan luas wilayah yang besar maka semakin besar pula anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah agar mampu melakukan pembangunan di daerah tersebut. Pengeluaran yang dilakukan pemerintahan perlulah untuk dilaporkan kepada masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban mereka terhadap hasil kerja mereka dalam mengelola dana yang berasal dari masyarakat. Pelaporan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah setiap daerah dengan memanfaatkan *E-Government* yang dimilikinya.

Teori *stewardship* yang menyatakan bahwa sektor publik wajib menempatkan kepentingan masyarakat (*agent*) sebagai prioritas sehingga sektor publik dituntut untuk selalu berorientasi pada perbaikan kinerja secara terus menerus sehingga mencapai kinerja yang optimal untuk kepentingan organisasi (Donaldson serta Davis, 1991). Dalam upaya melakukan perbaikan kinerja secara terus menerus, pemerintah suatu daerah perlu melaksanakan *E-Government* secara optimal. Daerah dengan jumlah penduduk yang lebih banyak, membutuhkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan *E-Government* yang lebih banyak untuk pelayanan kepada publik jika dibandingkan dengan daerah dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit.

Dengan adanya Kemandirian Daerah maka daerah tersebut dapat dengan leluasa untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada seluruh masyarakat yang berada didalam wilayah pemerintahannya walaupun luas wilayah yang dikelolanya sangat besar dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan *E-Government* sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pemerintah kepada masyarakat. Berdasarkan uraian ringkas teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H4: Kemandirian Daerah berpengaruh terhadap hubungan antara Luas Wilayah dengan Pelaksanaan *E-Government*.**



### ***Kemandirian Daerah dapat memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pelaksanaan E-Government***

Menurut Tahar & Zakhiya (2011) Kemandirian Daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Tolosang (2018) mengatakan bahwasanya di era otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, salah satu faktor tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah.

Teori *stewardship* yang menyatakan bahwa sektor publik wajib menempatkan kepentingan masyarakat (*agent*) sebagai prioritas sehingga sektor publik dituntut untuk selalu berorientasi pada perbaikan kinerja secara terus menerus sehingga mencapai kinerja yang optimal untuk kepentingan organisasi (Donaldson serta Davis, 1991; Erayanti, 2021). Dalam upaya melakukan perbaikan kinerja secara terus menerus, pemerintah suatu daerah perlu melaksanakan *E-Government* secara optimal. Daerah dengan PAD yang lebih banyak, membutuhkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan *E-Government* yang lebih banyak untuk pelayanan kepada publik jika dibandingkan dengan daerah dengan PAD yang lebih sedikit.

Dengan adanya Kemandirian Daerah maka daerah tersebut dapat dengan leluasa untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada seluruh masyarakat yang berada didalam wilayah pemerintahannya apalagi dengan didukung oleh PAD yang dikelolanya sangat besar sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan *E-Government* sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pemerintah kepada masyarakat. Berdasarkan uraian ringkas teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  
**H<sub>5</sub>: Kemandirian Daerah memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pelaksanaan E-Government.**

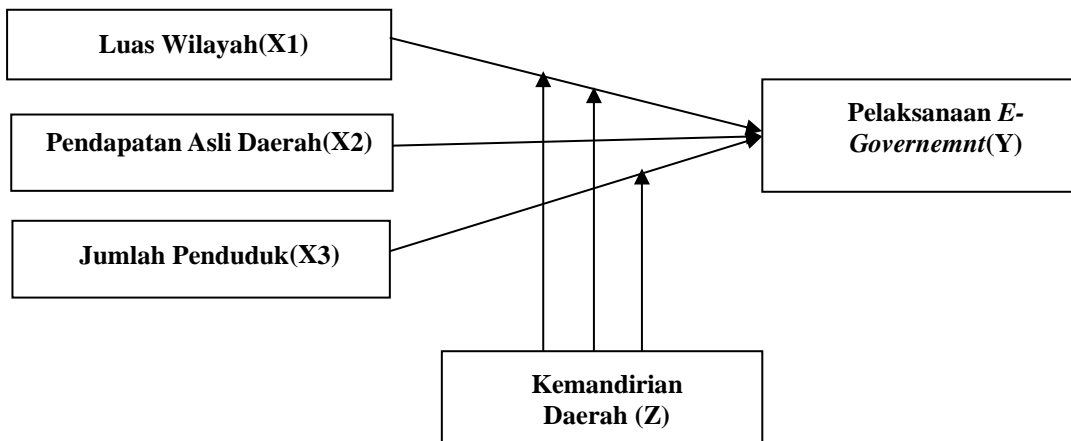
### ***Kemandirian Daerah dapat memoderasi hubungan antara Jumlah Penduduk dengan Pelaksanaan E-Government***

Gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya (Tahar & Zakhiya, 2011). Teori *stewardship* yang menyatakan bahwa sektor publik wajib menempatkan kepentingan penduduk (*agent*) sebagai prioritas sehingga sektor publik dituntut untuk selalu berorientasi pada perbaikan kinerja secara terus menerus sehingga mencapai kinerja yang optimal untuk kepentingan organisasi (Donaldson serta Davis, 1991). Dalam upaya melakukan perbaikan kinerja secara terus menerus, pemerintah suatu daerah perlu melaksanakan *E-Government* secara optimal. Daerah dengan Jumlah Penduduk yang lebih banyak, membutuhkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan *E-Government* yang lebih banyak untuk pelayanan kepada publik jika dibandingkan dengan daerah dengan Jumlah Penduduk yang lebih sedikit.

Hal ini dilakukan karena daerah tersebut telah mendapatkan penerimaan dari pajak yang telah dibayarkan oleh penduduk tersebut sehingga pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan penerimaan tersebut dengan cepat, efisien dan efektif dengan memanfaatkan e-government melalui sistem digitalisasi. Berdasarkan uraian ringkas teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>6</sub>: Kemandirian Daerah terhadap hubungan antara Jumlah Penduduk dengan Pelaksanaan E-Government.**

**Model Penelitian**



**Gambar 1. Model Penelitian**

**METODE PENELITIAN**

**Cara Penentuan Ukuran Sampel**

Dalam penentuan sampel, peneliti ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria yang ditentukan berdasarkan kebijakan dari penelitian dengan kriteria sebagai berikut: Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumbagteng tahun 2020-2022 dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumbagteng yang terdapat pada pemeringkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2020-2022. Terdapat 123 data observasi yang diambil dari 41 Kabupaten/Kota yang berasal dari rentang waktu observasi selama 3 (tiga) tahun dimulai dari tahun 2020-2022.

**Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui website resmi berupa catatan atau bukti yang sudah terpublikasi secara umum yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), PanRB Provinsi Riau dan website [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id).

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi yang diperoleh dari penelusuran data dari media elektronik dan berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

**Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis menggunakan regresi linier berganda dan Conditional Process Analysis dari Hayes

**Definisi Operasionalisasi Variabel dan Pengukurannya**

**Tabel 2**

**Matriks Operasionalisasi Variabel dan Pengukurannya**

	Variabel	Pengukuran	Skala Pengukuran
<b>Dependen</b>	<i>E-Government</i> (Y)	Nilai hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikeluarkan oleh PanRB.	Rasio



	Variabel	Pengukuran	Skala Pengukuran
<b>Independen</b>	Luas Wilayah (X1)	Ukuran besar wilayah pada masing-masing daerah Kabupaten/Kota	Rasio
	Pendapatan Asli Daerah (X2)	Nilai PAD pada masing-masing daerah Kabupaten/Kota	Rasio
	Jumlah Penduduk (X3)	Jumlah jiwa yang ada pada masing-masing daerah Kabupaten/Kota	Rasio
<b>Moderating</b>	Kemandirian Daerah (Z)	Rasio Kemandirian daerah <i>PAD</i> <i>Total Pendapatan Daerah</i>	Rasio

Sumber: Data Olahan, 2024

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif ditunjukkan pada Tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3**

### Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
Luas Wilayah (X1)	123	23,56	13521,26	4230,04	3461,6016
PAD (X2)	123	38,01	783,00	149,54	132,7778
Penduduk (X3)	123	96600,00	857752,00	379443,67	159346,663
<i>e-government</i> (Y)	123	1,00	3,50	2,20	0,5902
Kemandirian Daerah (Z)	123	1,0	30,80	10,68	5,89

Sumber: Data Olahan, 2024

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan selama tahun penelitian 2020-2022 adalah sebanyak 123 data. Nilai minimum merupakan nilai terendah untuk setiap variabel, sedangkan nilai maksimum merupakan nilai tertinggi untuk setiap variabel dalam penelitian. Deskriptif menunjukkan nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi yang menunjukkan bahwa penyebaran data merata (homogen).

### Hasil Uji Hipotesis

Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 4 berikut

**Tabel 4**

### Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	1.684	.087			19.315	.000
Luas (X1)	.001	.000	.272		3.162	.002
PAD (X2)	.002	.001	.284		2.509	.013
Penduduk X3	.001	.000	.236		2.024	.045

a. Dependent Variable: SPBE (Y)

Sumber: Data Olahan, 2024

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4 Dapat dijelaskan masing-masing uji hipotesis. Hasil pengujian hipotesis 1 dapat dilihat nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,162 nilai ini lebih besar dari t tabel  $t_{tabel}$  1,980 dengan nilai  $P_{value}$   $0,002 < 0,05$ . Maka  $H_0$ 1 ditolak dan  $H_a$  1 diterima, sehingga dapat simpulkan bahwa luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan E-Government. Hasil pengujian Hipotesis 2 (Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pelaksanaan



E-Government pada tabel 4 dapat dilihat nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,509 nilai ini lebih besar dari  $t$  tabel  $t_{tabel}$  1,980 dengan nilai  $P_{value}$   $0,013 < 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan E-Government Hasil pengujian Hipotesis 3 (Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap pelaksanaan E-Government tabel 4 dapat dilihat nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,024 nilai ini lebih besar dari  $t$  tabel  $t_{tabel}$  1,980 dengan nilai  $P_{value}$   $0,045 < 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan E-Government

### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Pada tabel 5 mengindikasikan kemampuan persamaan regresi untuk menunjukkan tingkat penjelasan model terhadap variabel dependen.

**Tabel 5**

### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.562 <sup>a</sup>	.316	.299	.51369

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk (X3), Luas (X1), PAD (Milyar) (X2)

b. Dependent Variable: SPBE (Y)

Sumber: Data Olahan, 2024

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R Square* yang diperoleh sebesar 0,299 atau 2,99%. Artinya, luas wilayah, PAD, dan jumlah penduduk dapat mempengaruhi pelaksanaan *E-Government* sebesar 29,9%. Sedangkan sisanya 70,1 % dipengaruhi oleh faktor lain.

### Hasil Uji Hipotesis Menggunakan Macro Process Hayes (Hipotesis 4,5,6)

#### Pengaruh Luas Wilayah terhadap Pelaksanaan E-Government dengan Kemandirian Daerah sebagai Variabel Moderasi (Hipotesis 4)

Hasil analisis *Process Hayes* untuk variabel luas wilayah dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 6**

### Hasil Regresi Macro Procces Hayes luas wilayah

Model	Coeff	se	T	p
Constant	1.4262	0.1630	8.7492	0,0000
X1	0,0417	0,0112	3,7199	0,0003
Z	0,0000	0,0000	1,0175	0,3110
Int_1	0,0001	0,0000	1,3895	0,1673

Sumber: Data Olahan, 2024

Berdasarkan analisis *Process Hayes* memperlihatkan signifikansi  $p$  (1,673)  $> 0,05$ . Hal ini menunjukkan kemandirian daerah tidak memoderasi pada pengaruh luas wilayah terhadap *E-Government*.

#### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pelaksanaan E-Government dengan Kemandirian Daerah sebagai Variabel Moderasi (Hipotesis 5)

Hasil analisis *Process Hayes* untuk variabel Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari tabel berikut ini.

**Tabel 7**

### Hasil Regresi Macro Procces Hayes Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Model	Coeff	se	T	p
Constant	1.3437	0.1819	7,3883	0,0000
X2	0,0048	0,0011	4,1788	0,0001
Z	0,0553	0,0157	3,5199	0,0006



Model	Coeff	se	T	p
Int_1	0,0002	0,0001	3,3497	0,0011

Sumber: Data Olahan, 2024

Hasil analisis Process Hayes menunjukkan kemandirian daerah dan interaksi (X2\*Z) signifikan yakni  $p\text{-value}$  (0,0001) > 0,05, artinya kemandirian daerah memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap *E-Government*. Nilai koefisien interaksi (X2\*Z) bernilai positif sebesar 0,0002 jadi dapat disimpulkan kemandirian daerah memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap *E-Government*. Meningkatnya kemandirian daerah terutama pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan menyebabkan penerapan *e-government* yang semakin baik pula

***Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pelaksanaan E-Government dengan Kemandirian Daerah sebagai Variabel Moderasi (Hipotesis 6)***

Hasil analisis Process Hayes untuk variabel jumlah penduduk dapat dilihat dari tabel berikut ini.

**Tabel 10**

**Hasil Regresi Macro Procces Hayes Jumlah Penduduk**

Model	Coeff	se	t	p
Constant	0,7940	0,2216	3,5826	0,0005
X3	0,0000	0,0000	5,8160	0,0000
Z	0,0863	0,0172	5,0207	0,0000
Int_1	0,0001	0,0000	4,1617	0,0001

Sumber: Data Olahan, 2024

Hasil analisis Process Hayes menunjukkan kemandirian daerah dan interaksi (X3\*Z) signifikan yakni  $p\text{-value}$  (0,0001) > 0,05, artinya kemandirian daerah memoderasi pengaruh jumlah penduduk terhadap *E-Government*. Nilai koefisien interaksi (X3\*Z) bernilai positif sebesar 0,0001 jadi dapat disimpulkan kemandirian daerah memperkuat pengaruh jumlah penduduk terhadap *E-Government*. Meningkatnya kemandirian daerah dengan jumlah penduduk yang meningkat maka akan mempengaruhi penerapan *e-government* yang semakin baik pula.

**Pembahasan**

***Pengaruh Luas Wilayah Terhadap pelaksanaan E-Government***

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa luas wilayah berpengaruh terhadap pelaksanaan *E-Government*. Nilai koefisien memiliki tanda positif, artinya semakin luas wilayah maka semakin baik pelaksanaan *E-Government*. Berpengaruhnya luas wilayah terhadap pelaksanaan *E-Government* dapat dilihat dari hasil penelitian dimana luas wilayah yang besar akan memperoleh nilai SPBE yang baik pula, salah satu contohnya Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Kabupaten yang memiliki luas wilayah terbesar di Provinsi Sumatera Barat., dengan luas 6045,65 Km<sup>2</sup>, selama 3 tahun berturut-turut selalu memperoleh nilai indek SPBE di atas 3 dengan kategori baik. Hal ini membuktikan bahwa semakin luas wilayah yang dimiliki akan dapat meningkatkan pelaksanaan *E-Government*.

Berpengaruhnya luas wilayah terhadap pelaksanaan *E-Government* disebabkan kar bahwa wilayah yang semakin luas maka daerah tersebut akan membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak untuk mendukung Luas wilayah akan mempengaruhi jumlah realisasi belanja modal pemerintah yang erat kaitannya dengan peningkatan pelayanan publik. Daerah wilayah yang lebih luas, membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak untuk pelayanan kepada publik jika dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas.. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rohmah dan Riharjo (2019) yang menunjukkan bahwa semakin besar luas wilayah maka akan semakin besar belanja yang

harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut dalam memenuhi dan melayani masyarakat diseluruh daerahnya dengan melakukan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan *E-Government*. Dengan dioptimalkannya pelaksanaan *E-Government*, hal ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis digital karena dinilai lebih cepat, efektif dan efisien dalam melayani masyarakat diseluruh wilayah kerja mereka

Keberhasilan pelaksanaan *E-Government* tidak terlepas dari pengaruh besarnya luas wilayah suatu daerah. Pelaksanaan *E-Government* yang dilakukan oleh pemerintah suatu daerah memegang peranan penting dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan dalam rangka untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi kinerja dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah pemerintah pemerintah (*steward*) wilayah Sumbagteng yang diberikan kepercayaan dalam memimpin suatu wilayah sehingga dapat perannya dengan sangat baik sehingga pelaksanaan *e-government* dapat maksimal. Pelaksanaan *E-Government* yang maksimal ini akan dapat memberikan dampak kepada kepentingan masyarakat sebagai *principal*. Menurut (Handayani, 2022) teori ini dalam hal menjelaskan hubungan antara lingkungan birokrasi dengan pelaksanaan *E-Government* adalah dalam mencapai pelaksanaan *e-government* yang optimal harus terdapat kesesuaian antara lingkungan yang ada disuatu organisasi dengan tujuan yang akan dicapai.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang mendukung tentang adanya pengaruh antara Luas Wilayah terhadap pelaksanaan *E-Government* adalah Afaf (2020), Maulana dan Fadhlia (2020), dan Rona (2017) sedangkan penelitian Pradipta dan Sofyani (2021) menyatakan sebaliknya bahwasanya tidak ada pengaruh antara luas wilayah terhadap pelaksanaan *E-Government*.

### ***Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pelaksanaan E-Government***

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pelaksanaan *E-government*. Nilai koefisien jalur memiliki tanda positif, artinya semakin banyak pendapatan asli daerah maka semakin baik pelaksanaan *E-government*. Berpengaruhnya pendapatan asli daerah terhadap pelaksanaan *e-government* menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah yang dimiliki pemerintah daerah Sumbagteng sudah tergolong tinggi, sehingga dapat mendorong pelaksanaan *E-Government* yang semakin baik. Salah satu contohnya adalah pada Kota Pekanbaru yang memiliki nilai PAD yang tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota di wilayah Sumbagteng lainnya. Kota Pekanbaru mengalami peningkatan PAD setiap tahunnya, hal ini juga mendorong nilai indeks SPBE semakin meningkat setiap tahunnya. Berpengaruhnya PAD terhadap pelaksanaan *E-Government* disebabkan karena pemerintah daerah tersebut akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana yang lebih besar pula dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan besarnya PAD suatu wilayah pemerintah akan mempunyai biaya yang cukup untuk melayani masyarakat melalui pelaksanaan *E-Government*

Pendapatan asli daerah ialah salah satu sumber utama yang di gunakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya dimana bertujuan untuk mengembangkan daerah tersebut, sehingga pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka pembangunan daerah dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang di peroleh. *E-government* dalam penerapannya biasanya membutuhkan biaya yang besar. Hal ini memungkinkan bahwasanya jika kesejahteraan ekonomi daerah sudah baik, pemerintah akan mempunyai biaya yang cukup dalam pembiayaan untuk melayani masyarakat melalui implementasi *e-government*. Menurut Hapsari & Mahardika (2019) semakin besar pendapatan yang diperoleh mempengaruhi pemenuhan sarana prasarana dalam rangka pembangunan daerah, sehingga untuk Pelaksanaan



*E-Government* yang optimal membutuhkan biaya yang besar. Hal ini memungkinkan jika kesejahteraan ekonomi daerah (dilihat dari perolehan PAD) sudah baik, pemerintah akan mempunyai biaya yang cukup untuk melayani masyarakat melalui pelaksanaan *E-Government*.

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah pelaksanaan *E-Government* yang dilakukan oleh pemerintah (*steward*) suatu daerah memegang peranan penting dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat (*agent*) akan informasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah (*steward*) kepada Masyarakat (*agent*).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi dan Haryanto (2013), Rahim dan Martani (2015) serta Sipahutar dan Sutaryo (2017) yang menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Pelaksanaan *E-Government*. Namun berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh penelitian Adhi dan Suhardi (2010) menyatakan sebaliknya bahwasanya tidak ada pengaruh antara PAD terhadap Pelaksanaan *E-Government*.

### ***Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pelaksanaan E-Government***

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap pelaksanaan *E-Government*. Nilai koefisien jalur memiliki tanda positif, artinya semakin banyak jumlah penduduk maka semakin baik pelaksanaan *E-Government*. Hal ini juga dapat dilihat dari data penelitian, dimana Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah penduduk yang terbanyak dibandingkan Kabupaten/Kota di wilayah Sumbagteng lainnya. Kota Pekanbaru mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya, hal ini juga mendorong nilai indeks SPBE semakin meningkat setiap tahunnya. Berpengaruhnya jumlah penduduk terhadap pelaksanaan *E-Government* disebabkan jumlah penduduk yang lebih banyak, membutuhkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan *E-Government* yang lebih banyak untuk pelayanan kepada publik.

Moon dan Norris (2005) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah yang lebih besar memiliki kemungkinan untuk mengadopsi teknologi *E-Government* dibanding pemerintah daerah yang lebih kecil, karena pemerintah daerah yang lebih besar cenderung mendapatkan tuntutan yang lebih besar untuk menyediakan pelayanan publik serta meningkatkan pelayanan informasi. Hal tersebut juga didukung oleh Sipahutar dan Sutaryo (2017). Semakin banyaknya jumlah penduduk suatu daerah maka akan berpengaruh pada pelaksanaan *E-Government* daerah tersebut yang cenderung akan semakin meningkat karena akan membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih besar agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat jika dibandingkan dengan daerah dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit.

Adriani dan Handayani (2008) juga menyatakan bahwa pada tingkat moderat pengaruh jumlah penduduk memiliki manfaat bagi pembangunan ekonomi, baik untuk negara-negara maju maupun negara-negara yang berkembang. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar tuntutan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi aspirasi penduduknya. Karenanya, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjangkau dan memberikan layanan kepada seluruh penduduk di pelosok daerah

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa sektor publik wajib menempatkan kepentingan masyarakat (*agent*) sebagai prioritas sehingga sektor publik dituntut untuk selalu berorientasi pada perbaikan kinerja secara terus menerus sehingga mencapai kinerja yang optimal untuk kepentingan organisasi (Donaldson serta Davis, 1991; Erayanti, 2021).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi dan Haryanto (2013), yang menunjukkan adanya pengaruh antara Jumlah Penduduk terhadap pelaksanaan *E-Government*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Sofyani (2021) serta Verawaty (2014) menyatakan sebaliknya bahwasanya tidak ada pengaruh antara Jumlah Penduduk terhadap Pelaksanaan *E-Government*.

### ***Moderasi Kemandirian Daerah Terhadap Hubungan Luas Wilayah Terhadap Pelaksanaan E-Government***

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis keempat dapat dijelaskan bahwa luas atau tidaknya wilayah tidak memberikan dampak dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh kemandirian wilayah terhadap pelaksanaan *E-Government*. Tidak mampunya kemandirian daerah dalam memoderasi pengaruh luas wilayah terhadap *E-Government* juga diyakini bahwa tingkat kemandirian yang dimiliki Pemerintah Daerah di wilayah Sumbagteng rata-rata masih tergolong rendah sekali, artinya citra kemandirian daerah belum sepenuhnya mempunyai kemampuan sumber daya keuangan daerah untuk membangun daerahnya. Menurut Tahar et al (2011) menjelaskan bahwa gambaran citra Kemandirian Daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya. Dengan luas wilayah yang besar maka semakin besar pula anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah agar mampu melakukan pembangunan di daerah tersebut

Tidak mampunya kemandirian daerah dalam memoderasi pengaruh luas wilayah terhadap *E-Government* juga disebabkan karena kemandirian daerah terbatas pada skala nasional yang relatif luas atau hanya pada tingkat provinsi. Jadi walaupun kabupaten/kota memiliki wilayah yang luas karena kemandirian daerah hanya tingkat provinsi menyebabkan tidak berpengaruhnya pelaksanaan *E-Government*. Menurut Azwar (2023) menyatakan bahwa studi sebelumnya yang berfokus pada pelaksanaan desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah seperti yang telah diuraikan di atas masih terbatas pada skala nasional yang relatif luas atau hanya pada tingkat provinsi. Studi yang berfokus pada pelaksanaan desentralisasi fiskal khususnya yang berkaitan dengan kemandirian keuangan daerah pada tingkat kabupaten atau kota dalam satu provinsi juga dianggap kurang, terutama di KTI. Karena setiap daerah (regional) memiliki karakteristik dan kondisi geografis yang berbedabeda, ini seyogianya harus menjadi prioritas utama. Keberhasilan sangat bergantung pada elemen kemandirian daerah, terutama di tingkat lokal.

Implikasi teori *stewardship* yang menyatakan bahwa sektor publik wajib menempatkan kepentingan masyarakat (*agent*) sebagai prioritas sehingga sektor publik dituntut untuk selalu berorientasi pada perbaikan kinerja secara terus menerus sehingga mencapai kinerja yang optimal untuk kepentingan organisasi Pemerintah sebagai (*steward*) sudah memfokuskan kegiatan untuk kepentingan masyarakat (*agent*). Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala sehingga kemandirian wilayah tidak mampu memperkuat atau memperlemah hubungan luas wilayah terhadap pelaksanaan *E-Government*

### ***Moderasi Kemandirian Daerah terhadap hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pelaksanaan E-Government***

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis kelima dapat dijelaskan bahwa kemandirian daerah memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pelaksanaan *E-Government*. Adanya pendapatan asli daerah yang tinggi tersebut maka pemerintah daerah akan melakukan hal yang dapat memajukan organisasi sehingga akan mendorong kemandirian daerah lebih baik lagi sehingga akan menyebabkan baiknya pelaksanaan *E-Government*. Hal ini dapat dilihat dari hasil temuan data penelitian, salah satu adalah Kota Pekanbaru yang memiliki persentase kemandirian tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Sumbagteng lainnya. Tingginya tingkat kemandirian daerah akan memperkuat pengaruh PAD terhadap pelaksanaan *E-Government*.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan adanya kemandirian daerah maka daerah tersebut dapat dengan leluasa untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada seluruh masyarakat yang berada di dalam wilayah pemerintahannya apalagi dengan didukung oleh PAD yang dikelolanya sangat besar sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan *E-*



*Government* sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pemerintah kepada masyarakat

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis kelima dapat dijelaskan bahwa kemandirian daerah memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pelaksanaan *E-Government*. Adanya pendapatan asli daerah yang tinggi tersebut maka pemerintah daerah akan melakukan hal yang dapat memajukan organisasi sehingga akan mendorong kemandirian daerah lebih baik lagi sehingga akan menyebabkan baiknya pelaksanaan *E-Government*. Dengan adanya Kemandirian Daerah maka daerah tersebut dapat dengan leluasa untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada seluruh masyarakat yang berada didalam wilayah pemerintahannya apalagi dengan didukung oleh PAD yang dikelolanya sangat besar sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan *E-Government* sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pemerintah kepada masyarakat

Teori *stewardship* yang menyatakan bahwa sektor publik wajib menempatkan kepentingan masyarakat (*agent*) sebagai prioritas sehingga sektor publik dituntut untuk selalu berorientasi pada perbaikan kinerja secara terus menerus sehingga mencapai kinerja yang optimal untuk kepentingan organisasi (Donaldson serta Davis, 1991; Erayanti, 2021). Dalam upaya melakukan perbaikan kinerja secara terus menerus, pemerintah suatu daerah perlu melaksanakan *E-Government* secara optimal. Daerah dengan PAD yang lebih banyak, membutuhkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan *E-Government* yang lebih banyak untuk pelayanan kepada publik jika dibandingkan dengan daerah dengan PAD yang lebih sedikit.

Gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya (Tahar & Zakhiya, 2011). Menurut Tahar & Zakhiya (2011) Kemandirian Daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Tolosang (2018) mengatakan bahwasanya di era otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, salah satu faktor tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah.

### ***Moderasi Kemandirian terhadap hubungan antara Jumlah Penduduk dengan Pelaksanaan E-Government***

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis keenam dapat dijelaskan bahwa kemandirian daerah memperkuat pengaruh jumlah penduduk terhadap pelaksanaan *E-Government*. Adanya jumlah penduduk yang banyak tersebut maka pemerintah daerah akan melakukan hal yang dapat memajukan organisasi sehingga akan mendorong kemandirian daerah lebih baik lagi sehingga akan menyebabkan baiknya pelaksanaan *E-Government*. Hal ini dapat dilihat dari hasil temuan data penelitian, salah satu adalah Kota Pekanbaru yang memiliki persentase kemandirian tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Sumbagteng lainnya dan didukung dengan jumlah penduduk yang banyak menyebabkan meningkatnya nilai indeks SPBE yang diperoleh.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan tingginya jumlah penduduk dan semakin tingginya PAD per kapita menyebabkan semakin meningkatnya daya beli masyarakat pada kendaraan bermotor sehingga menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, maka semakin meningkat pula pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dengan meningkatnya pendapatan daerah maka akan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi sehingga pelaksanaan

*E-Government* meningkat.

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa sektor publik wajib menempatkan kepentingan penduduk (*agent*) sebagai prioritas sehingga sektor publik dituntut untuk selalu berorientasi pada perbaikan kinerja secara terus menerus sehingga mencapai kinerja yang optimal untuk kepentingan organisasi (Donaldson serta Davis, 1991). Dalam upaya melakukan perbaikan kinerja secara terus menerus, pemerintah suatu daerah perlu melaksanakan *E-Government* secara optimal. Daerah dengan Jumlah Penduduk yang lebih banyak, membutuhkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan *E-Government* yang lebih banyak untuk pelayanan kepada publik jika dibandingkan dengan daerah dengan Jumlah Penduduk yang lebih sedikit.

## SIMPULAN

Luas wilayah berpengaruh terhadap *e-government*, hal ini menunjukkan bahwa wilayah yang semakin luas maka daerah tersebut akan membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak untuk mendukung kegiatan pemerintahan agar masyarakat diseluruh wilayah itu dapat menerima dan mengakses informasi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di pemerintahan dengan lebih cepat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap *e-government*, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah yang dimiliki pemerintah daerah Sumbagteng sudah tergolong tinggi sehingga dapat mendorong pelaksanaan *e-government*. Jumlah penduduk berpengaruh terhadap *e-government*, Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang lebih banyak, membutuhkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan *E-Government* yang lebih banyak untuk pelayanan kepada publik. Kemandirian daerah tidak memoderasi pengaruh luas wilayah terhadap *e-government*. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian wilayah yang tidak mampu memperkuat atau memperlemah hubungan luas wilayah terhadap *e-government*. Kemandirian daerah memoderasi pengaruh luas wilayah terhadap *e-government* Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah mampu memperkuat hubungan PAD terhadap *e-government*. Kemandirian daerah memoderasi pengaruh jumlah penduduk terhadap *e-government* Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah mampu memperkuat hubungan jumlah penduduk terhadap *e-government*

Sampel penelitian ini hanya menggunakan pemerintah daerah di wilayah Sumbagteng, sehingga kurang memberikan gambaran yang lebih jelas ke semua objek mengenai penerapan *e-government*. Rentang waktu yang dilakukan penelitian hanya selama 3 tahun, yaitu periode 2020-2022. Periode penelitian masih terlalu singkat sehingga kurang maksimal hasil yang diperoleh. Penelitian ini hanya menganalisis sesuai dengan hipotesis yang diajukan, sehingga tidak bisa menggambarkan tentang faktor-faktor lain di luar penelitian.

Bagi peneliti selanjutnya memperluas jangkauan penelitian dengan menambah sampel yang lebih luas untuk dapat menggeneralisir seluruh objek penelitian Pemerintah Daerah. Memperpanjang periode penelitian yang digunakan, tidak hanya periode 3 tahun agar dapat menghasilkan informasi yang lebih baik dan akurat. Memperluas analisis dengan menambah faktor yang dapat mempengaruhi *e-government*: ukuran perusahaan, insentif pajak dan lain-lain.

Implikasi penelitian ini yaitu bagi pemerintah daerah selaku pelaksana *E-Government* hendaknya untuk senantiasa memaksimalkan penerapannya dengan mempertimbangkan luas wilayah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jumlah penduduk serta meningkatkan kemandirian daerah sehingga mampu melaksanakan *E-Government* dengan lebih baik lagi.

## REFERENSI

Alvini, Y., Basri, Y. M., & Hasan, M. A. (2018). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi pada kabupaten/kota se-



- Provinsi Riau Periode 2011-2016). *Jom Feb*, 1(1), 1–15.
- Arsita, R. (2020). *Pengaruh Pengangguran dan Kesejahteraan Daerah terhadap Pengungkapan Informasi Non Keuangan dengan Aksesibilitas Internet sebagai Pemoderasi (Studi Kasus pada Website Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia)*.
- Azwar, A. (2023). analisis kemandirian keuangan daerah dan potensi pertumbuhan kabupaten/kota di sulawesi selatan tahun 2017-2021. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*
- Dasmar, T., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah,, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit (BPK) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Riau). *Jurnal Al-Iqtishad*, 16(2), 39. <https://doi.org/10.24014/jiq.v16i2.10788>
- Dewi, A. S., & Haryanto, H. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi E-Government (Studi Pada Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Di Indonesia)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Governance and Shareholfer Returns. *Australian Journal of Management*, June 1991, 49–66.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Salemba Empat.
- Handayani, S. A. (2022). *Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Sipaduko Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Pada Era New Normal*. Ilmu Pemerintahan.
- Hayes, A. F. (2022). Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach (Vol. 3). The Guilford Press.
- Kim, C.-K. (2007). A cross-national analysis of global E-government. *Public Organization Review*, 7, 317–329. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11115-007-0040-5>
- Maulana, F., & Fadhlia, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), 362–371.
- Oktaviani, S., & Indra Arza, F. (2020). Pengaruh Kompetisi Politik, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Opini Audit Terhadap Implementasi E-Government. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3312–3326. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.284>
- Pradipta, R., & Sofyani, H. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat Pelaksanaan E-Government Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 4(2), 185–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jakk.v4i2.7756>
- Pudin, S. (2018). *Digital Tourism: A Content Analysis of West Java Tourism Websites*.
- Rahim, S., Ahmad, H., Muslim, M., & Nursadirah, A. (2020). Disclosure of Local Government Financial Statements in South Sulawesi. *Brawijaya International Conference on Multidisciplinary Sciences and Technology (BICMST 2020)*, 1–6.
- Ramdani, E. M. (2018). Analisis Efektivitas Pelaksanaan E Government di Tingkat Kelurahan. *Sawala J. Adm. Negara*, 6(1), 31.
- Rohmah, N., & Riharjo, I. B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Se Privinsi Jawa Timur Tahun 2013–2017). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(6).
- Sanga, K. P., Hermanto, S. B., & Handayani, N. (2018). *Pengaruh Penerimaan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah*.
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan: mewujudkan pelayanan prima dan pemerintahan yang baik*. Refika Aditama. [https://books.google.co.id/books?id=aH\\_aSAAACAAJ](https://books.google.co.id/books?id=aH_aSAAACAAJ)



- Sipahutar, I. S., & Sutaryo. (2017). Faktor-Faktor Penentu Implementasi E-Government Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 1393–1408.
- Tahar, A., & Zakhiya, M. (2011). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 12(1), 88–99.
- Utami, R. D., Hapsari, D. W., & Mahardika, D. P. K. (2019). Kompetisi Politik, Pendapatan Asli Daerah Dan Opini Audit Terhadap Implementasi E-Government. *JRAK*, 11(1), 16–23.
- Verawaty, V. (2018). Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting Melalui E-Government Di Sumatera Bagian Selatan. *Simposium Nasional Akuntansi*.

